



## Normalisasi Risiko dan Krisis Pengelolaan Sampah di Sungai Niyama: Analisis Risk Society di Kawasan Penyangga Rural-Urban

Abdurrohman Habibul Auliya, Jiddan Alfarras, & A Zahid

<sup>1,2,3</sup> Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

\*Penulis Korespondensi [Habibauliya550@gmail.com](mailto:Habibauliya550@gmail.com), [jiddanalfarrasalfarras@gmail.com](mailto:jiddanalfarrasalfarras@gmail.com), [azahid19@uinsatu.ac.id](mailto:azahid19@uinsatu.ac.id)

**Abstract.** *This study examines the process of risk normalization in the waste management crisis at Niyama River, Besuki District, Tulungagung Regency, which serves as a cross-district drainage confluence and the operational site of a run-of-river hydroelectric power plant (PLTA). Drawing on Ulrich Beck's Risk Society framework and Berger and Luckmann's social construction of reality, this qualitative research employed field observation and semi-structured interviews with key actors, including the RT 09 Chairperson and the Village Head of Besuki. Findings reveal that the waste crisis at Niyama River cannot be reduced to technical failure alone; rather, it is the product of unequal risk distribution, institutional governance gaps, and organized irresponsibility across jurisdictional boundaries. Continuous waste-dumping practices, the absence of effective risk communication, and limited institutional capacity have collectively normalized ecological pollution as an accepted feature of daily life. Through the dialectic of externalization, objectivation, and internalization, waste disposal has evolved from individual habit into a social fact, ultimately generating a condition of falling back to sleep, the gradual loss of communal sensitivity to persistent ecological threats. These findings indicate that ecological risk normalization plays a critical role in reproducing environmental crises sustainably. Addressing the waste emergency at Niyama and similar rural-urban buffer zones requires a paradigmatic shift: from reactive, jurisdiction-based governance toward an ecosystem-centered approach that recognizes communities' rights to risk information, meaningful participation, and equitable burden-sharing*

**Keywords:** *risk society, risk normalization, waste management, Niyama River, social construction.*

**Abstrak.** Persoalan sampah di kawasan penyangga rural-urban merupakan salah satu tantangan lingkungan yang semakin kompleks di Indonesia. Sungai Niyama di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, memperlihatkan bagaimana akumulasi sampah lintas wilayah tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan, tetapi juga membentuk risiko ekologis yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses normalisasi risiko dalam krisis pengelolaan sampah di Sungai Niyama melalui perspektif Masyarakat Risiko (Risk Society) Ulrich Beck dan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi lapangan dan wawancara terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan di kawasan Sungai Niyama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis sampah di Sungai Niyama tidak dapat dipahami semata sebagai kegagalan teknis pengelolaan limbah, melainkan sebagai konsekuensi dari distribusi risiko ekologis yang tidak merata, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta proses sosial yang menormalisasi keberadaan pencemaran dalam kehidupan sehari-hari. Praktik pembuangan sampah yang berlangsung secara terus-menerus, absennya komunikasi risiko yang efektif, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan telah mendorong terbentuknya kondisi di mana masyarakat menerima pencemaran sungai sebagai realitas yang wajar. Temuan ini menunjukkan bahwa normalisasi risiko ekologis berperan penting dalam mereproduksi krisis lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di kawasan penyangga seperti Sungai Niyama memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada solusi teknis, tetapi juga pada penguatan kesadaran risiko, partisipasi masyarakat, dan tata kelola lingkungan yang lebih terintegrasi serta berkeadilan.

**Kata kunci:** masyarakat risiko, normalisasi risiko, pengelolaan sampah, Sungai Niyama, konstruksi sosial

Naskah Masuk: 11 Juni 2026; Revisi: 11 Juni 2026; Diterima: 12 Juni 2026; ; Terbit: 13 Juni 2026.

## 1. LATAR BELAKANG

Ekosistem sungai memiliki peran vital sebagai penopang layanan hidrologis yang menentukan kualitas kehidupan masyarakat (Nefilinda et al., 2025). Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, kekayaan sumber daya air di Indonesia tercermin dari keberadaan sekitar 70.000 sungai yang terbagi dalam 42.210 daerah aliran sungai (Chiquitita, 2025), namun mayoritas badan air tersebut kini berada dalam kategori polusi berat akibat akumulasi limbah plastik ilegal (Sakti et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik pengelolaan sampah yang tidak bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan distribusi risiko ekologis yang tidak merata antara pusat kota dan kawasan penyangga *rural-urban*.

Fenomena tersebut tampak secara konkret di Sungai Niyama, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung sebuah muara drainase lintas kabupaten yang sekaligus menjadi lokasi operasional PLTA tanpa bendungan. Sungai ini menerima aliran sampah dari seluruh wilayah Tulungagung dan Trenggalek, namun Bapak Suharto selaku kepala desa mengatakan bahwa Besuki hanya menyumbang 2% dari total sampah tapi justru menanggung beban ekologis terbesar (Wawancara Bapak Suharto, 22 Mei 2026). Situasi ini mencerminkan apa yang disebut (Ipsen & McMillan Lequieu, 2025) sebagai *sacrifice zones*: wilayah-wilayah yang secara struktural menanggung konsekuensi ekologis dari konsumsi urban tanpa mendapatkan kompensasi setara.

Sebagian besar penelitian terdahulu tentang pengelolaan sampah sungai di Indonesia cenderung bertumpu pada solusi teknis-manajerial (Indrawati, 2011; Meidiana & Gamse, 2010; Munawar et al., 2018) atau analisis perilaku individual (Mori et al., 2024; NejadSadeghi et al., 2025; Zhang et al., 2022), tanpa cukup memperhatikan bagaimana risiko lingkungan diproduksi, didistribusikan, dan dinormalisasi secara sosial. (Zunariyah et al., 2025a) menunjukkan pentingnya dinamika partisipasi warga dan modal sosial dalam transformasi komunitas bantaran sungai, namun dimensi konstruksi sosial atas normalisasi risiko khususnya dikawasan *rural-urban* belum mendapat perhatian yang memadai.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada integrasi kerangka *Risk Society* (Beck, 1992) dengan dialektika Konstruksi Sosial (Berger & Luckmann, 2016) untuk menjelaskan bagaimana risiko ekologis tidak hanya diproduksi dan didistribusikan secara tidak merata, tetapi juga dinormalisasi hingga diterima sebagai realitas sosial yang wajar.

Dengan mengambil kasus Sungai Niyama sebagai kawasan penyangga *rural-urban*, artikel ini bertujuan menganalisis pertama bagaimana *governance gap* dan *organized irresponsibility* menghasilkan distribusi risiko yang timpang di Sungai Niyama, kedua bagaimana proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi membentuk normalisasi risiko ekologis, dan ketiga implikasi normalisasi tersebut bagi kemungkinan transformasi tata kelola lingkungan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### *Risk Society dan Organized Irresponsibility*

*Risk Society* (Risiko gesell Schaft) (Beck, 1992) menegaskan bahwa modernisasi secara paradoksal melahirkan risiko-risiko yang melampaui institusi tradisional untuk mengendalikannya (Krahmann, 2011). Berbeda dari distribusi kemakmuran yang mengikuti logika kelas, risiko ekologis menyebar lintas batas geografis, administratif, dan sosial secara tidak terprediksi. Di negara berkembang, kapasitas kelembagaan yang terbatas dan koordinasi antar pemerintah yang lemah menyebabkan risiko ini mengendap secara tidak proposional pada komunitas yang paling sedikit berkontribusi terhadap produksinya (Bengtsson et al., 2012; Gopakumar, 2011).

Konsep *organized irresponsibility* (Beck, 1992) menjelaskan mekanisme di mana setiap aktor dalam sistem dapat merujuk pada aturan dan prosedurnya sendiri untuk melegitimasi ketidakresponsifnya terhadap risiko kolektif. Kondisi ini menghasilkan *governance gap* kesenjangan antara kebutuhan pengelolaan ekologis lintas batas dan kapasitas kelembagaan yang terfragmentasi secara yurisdiksi (Bulkeley & Betsill, 2005; Meadowcroft, 2007). Ketika tidak ada satu pun aktor yang merasa memiliki tanggung jawab penuh atas sistem secara keseluruhan, risiko ekologis terakumulasi tanpa pengawasan memadai dan dalam jangka panjang (ternormalisasi).

### **Konstruksi Sosial Realitas dan Normalisasi Risiko**

(Berger & Luckmann, 2016) menjelaskan konstruksi realitas sosial melalui tiga momen dialektis: eksternalisasi (proyeksi kebiasaan kolektif ke dunia luar), objektivasi (transformasi kebiasaan menjadi fakta sosial yang tampak berada di luar kendali

individu), dan internalisasi (penyerapan realitas obyektif ke dalam kesadaran subyektif). Kerangka ini memungkinkan analisis tentang bagaimana praktik destruktif terhadap lingkungan dapat bertahan dan bahkan menguat, karena setiap momen dialektis memperkuat dan direproduksi oleh momen berikutnya (Kline, 2001).

Normalisasi risiko sebagaimana dikonseptualisasikan dalam literatur *risk perception* terjadi ketika komunitas yang berulang kali terpapar bahaya tanpa menyaksikan konsekuensi akut yang dramatis mengembangkan *risk habituation*: ancaman yang persisten namun gradual kehilangan daya gangguannya dan diterima sebagai bagian dari latar belakang normal kehidupan (Roeser, 2012; Njoku et al., 2019a). Dalam kerangka (Hird et al., 2014a), kondisi ini disebut *falling back to sleep* tertidurnya kesadaran kolektif terhadap ancaman yang sesungguhnya terus berlangsung. Proses ini tidak semata-mata produk ketidaktahuan, melainkan respons rasional terhadap kondisi struktural: ketika pengetahuan tentang risiko tidak tersedia, intervensi institusional tidak efektif, dan pilihan alternatif tidak terjangkau (Brown, 1992a).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif *Risk Society* dan Konstruksi Sosial sebagai kerangka analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, pertama observasi lapangan di lokasi persebaran sampah di sepanjang bantaran Sungai Niyama yang dilaksanakan pada April – Mei 2026 untuk mendokumentasikan kondisi fisik-ekologis sungai dan mengidentifikasi pola-pola perilaku pembuangan sampah, dan kedua wawancara semi-terstruktur dengan dua informan kunci, yaitu Bapak Subroto selaku Ketua RT 09 Desa Besuki dan Bapak Suharto selaku Kepala Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Informan dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan langsung mengenai dinamika pengelolaan sampah, kondisi lingkungan, dan relasi antarlembaga yang berkaitan dengan Sungai Niyama.

Analisis data dilakukan secara interpretatif dengan menghubungkan temuan observasi dan keterangan informan dengan konsep-konsep utama dalam teori *Risk Society*, seperti distribusi risiko, governance gap, dan organized irresponsibility, serta kerangka konstruksi sosial yang meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Untuk meningkatkan kredibilitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber

melalui perbandingan hasil observasi lapangan, wawancara, dan berbagai literatur maupun dokumen yang relevan dengan pengelolaan sampah dan tata kelola lingkungan.

Sungai Niyama dipilih sebagai lokasi fokus penelitian karena posisinya sebagai zona penyangga *rural-urban* yang menerima tekanan ekologis lintas yuridiksi, sekaligus menjadi lokasi operasional PLTA tanpa bendungan yang dikenal sebagai salah satu yang pertama di Asia. Karakteristik tersebut menjadikan Sungai Niyama sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji hubungan antara pembangunan infrastruktur, tata kelola lingkungan, dan distribusi risiko ekologis.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### *Governance Gap dan Organized Irresponsibility di Sungai Niyama*

Sungai Niyama menerima aliran sampah dari seluruh Tulungagung dan Trenggalek, meliputi sampah-sampah seperti, bambu, eceng gondok, sampah domestik, kayu, dan limbah industri yang terbawa arus tanpa kendali dari hulu. Perum Jasa Tirta (PJT) sebagai pengelola kebersihan di hadapan turbin PLTA telah memasang pelampung besi dan mengerahkan 5-10 truk per hari untuk pengerukan rutin, namun kapasitas ini jauh dari kata memadai dalam menghadapi volume sampah yang masuk, khususnya saat banjir besar yang memaksa dilakukannya prosedur *Flushing* yang mengalirkan seluruh akumulasi sampah ke laut (Wawancara informan Suharto, 22 Mei 2026).

Konfigurasi kelembagaan di Niyama secara struktural menghasilkan *organized irresponsibility* PJT bertanggung jawab di depan terowongan, pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek masing-masing bertanggung jawab atas sampah di wilayah yurisdiksinya, dan pemerintah Desa Besuki tidak memiliki kewenangan atas sampah yang bersumber dari luar desa. Tidak ada satu pun aktor yang merasa memiliki tanggung jawab penuh atas sistem secara keseluruhan. Bapak Subroto, Ketua RT 09, menyatakan bahwa limbah dari Tulungagung dan Trenggalek terus mengalir ke sini dan sudah ada kebijakan dari PLTA maupun PJT, namun implementasinya bergantung pada kesadaran manusia (Wawancara Informan Suharto & Subroto Mei 2026). Ketiadaan mekanisme koordinasi lintas batas yang mengikat ini merupakan ciri khas '*polycentric governance without coordination*' sistem multi-aktor tanpa mekanisme agregasi yang efektif (Bengtsson et al., 2012; Ostrom, 2010).

Dampak dari *governance gap* ini paling terasa bagi komunitas Desa Besuki. Bapak Suharto, Kepala Desa Besuki, menegaskan bahwa warganya hanya menyumbang sekitar 2 persen dari total sampah di sungai, namun justru menanggung dampak paling berat: pencemaran air tanah, polusi udara, dan proliferasi lalat akibat penimbunan sampah hasil pengerukan PJT di dekat pemukiman (Wawancara Informan Suharto, 22 Mei 2026). Ironi ini semakin tajam karena Desa Besuki sebagai lokasi PLTA yang menyediakan energi bagi wilayah yang jauh lebih luas pernah mengalami kesulitan mengakses air bersih dan listrik akibat penggalan yang menurunkan muka air tanah (Wawancara Informan Suharto, 22 Mei 2026). Sebuah ketidakadilan distribusional yang memperlihatkan bahwa manfaat pembangunan dan beban risiko terdistribusi secara sangat tidak merata (Post & Baud, 2003; Ipsen & McMillan Lequieu, 2025). Kondisi ini sejajar dengan temuan (Dwiky et al., 2026) yang menunjukkan bahwa komunitas bantaran sungai merupakan penerima utama risiko ekologis tanpa kuasa memengaruhi kebijakan di tingkat lebih tinggi.

### **Eksternalisasi dan Objektivasi: Konstruksi Sampah sebagai Fakta Sosial**

Dalam kerangka (Berger & Luckmann, 2016), pembuangan sampah ke Sungai Niyama telah melewati tiga momen dialektis secara sempurna. Pada tahap eksternalisasi, praktik membuang limbah pakan ternak, sisa pertanian, dan sampah domestik ke parit-parit kecil yang bermuara ke Niyama bukan lagi tindakan individual yang disengaja, melainkan proyeksi kolektif dari kebiasaan yang telah tertanam jauh sebelum infrastruktur persampahan formal hadir. Bapak Subroto mengungkapkan bahwa limbah pakan ternak dan eceng gondok dari parit-parit kecil sudah sejak lama terbawa ke sungai setiap musim hujan sebuah rutinitas yang tidak lagi membutuhkan keputusan sadar (Wawancara Informan Subroto, 18 Mei 2026).

Ketika eksternalisasi berlangsung cukup lama tanpa intervensi bermakna berarti mereka memasuki tahap objektivasi, kebiasaan subyektif bertransformasi menjadi kenyataan obyektif yang tampak berada di luar kendali individu mana pun. Di Sungai Niyama, objektivasi tampak dalam cara warga dan aparat desa mendeskripsikan sumber sampah '*selalu datang dari luar*', dari hulu, dari Trenggalek, dari Tulungagung. Pernyataan Bapak Suharto bahwa masyarakat Besuki hanya menyumbang 2 persen sampah mencerminkan objektivasi masalah sebagai sesuatu yang berada di luar

jangkauan tindakan lokal (Wawancara informan Suharto, 22 Mei 2026). Dalam perspektif (Cornea et al., 2017), ketidakseimbangan kapasitas antara PJT, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa dalam arena tata kelola lingkungan menghasilkan solusi yang mengutamakan efisiensi operasional institusi besar atas perlindungan komunitas terdampak dengan demikian mengonfirmasi objektivasi masalah sebagai fakta sosial yang *'sudah dari dulu begitu'*.

Absennya edukasi lingkungan yang terstruktur memperkuat proses objektivasi ini. Bapak Subroto menegaskan tidak pernah ada program edukasi khusus mengenai pengelolaan sampah di tingkat komunitas bantaran (Wawancara Informan Subroto, 9 Mei 2026). Bapak Suharto menambahkan bahwa sosialisasi yang pernah dilakukan melalui rapat bersama antara pemerintah desa, masyarakat, PJT, dan kecamatan tidak berdampak signifikan karena sumber utama sampah berasal dari luar yurisdiksi desa (Wawancara informan Suharto, 22 Mei 2026). Tanpa kerangka konseptual yang memadai untuk memahami mekanisme bahaya dan jalur paparan, masyarakat mengandalkan persepsi indrawi langsung sebagai proksi risiko, mengabaikan bahaya-bahaya yang tidak tampak seperti kontaminasi mikroplastik atau akumulasi logam berat (Wynne, 1996; Kumar et al., 2026). Pembuangan sampah yang dilakukan secara diam-diam sebelum subuh yang diidentifikasi warga sebagai tindakan *'orang luar'* (Wawancara Informan Subroto, 18 Mei 2026). memperlihatkan bagaimana objektivasi masalah juga berfungsi melemahkan tanggung jawab kolektif melalui mekanisme penyangkalan (Zunariyah et al., 2025a).

### **Internalisasi dan Falling Back to Sleep: Normalisasi Risiko di Bantaran Niyama**

Momen paling kritis dari dialektika konstruksi sosial di Niyama adalah internalisasi, proses di mana realitas objektif tentang sampah diserap kembali kedalam kesadaran subyektif komunitas sebagai bagian dari identitas dan cara pandang mereka. Masyarakat seakan masa bodoh (Wawancara informan Subroto, 18 Mei 2026). Bukan sekedar menggambarkan apatis individual, melainkan produk akhir dari proses sosial yang Panjang di mana ancaman lingkungan tetap diserap sebagai bagian tak terpisahkan dari kondisi hidup sehari-hari. Bau busuk dari sampah organik tidak lagi dipersepsikan sebagai sinyal bahaya, melainkan sebagai pertanda pergantian musim. Ikan yang mabuk akibat limbah industry illegal tidak lagi mendorong protes, tetapi menjadi kesempatan yang dinantikan sebagai warga untuk memanen ikan dengan mudah.

Kondisi ini merupakan manifestasi konkret dari *falling back to sleep* tertidurnya kesadaran kolektif terhadap ancaman yang terus berlangsung (Hird et al., 2014b). Tidak ada peristiwa tunggal yang dramatis di Niyama tidak ada ledakan TPA seperti Leuwigajah, tidak ada banjir yang menenggelamkan pemukiman secara permanen. Yang ada adalah akumulasi gradual: sampah yang sedikit demi sedikit menumpuk, kualitas air yang memburuk namun sulit dibuktikan langsung. Paparan kronis semacam ini, tanpa krisis akut, secara konsisten menghasilkan *normalization of pollution* kondisi di mana tingkat pencemaran yang membahayakan dipersepsikan sebagai kondisi "biasa" yang tidak memerlukan tindakan mendesak (Auyero & Swistun, 2009; Njoku et al., 2019b; Norsa'adah et al., 2020a).

Normalisasi ini tidak semata-mata produk ketidaktahuan, melainkan respons rasional terhadap kondisi struktural di mana pengetahuan tentang risiko tidak tersedia, intervensi institusional tidak efektif, dan pilihan alternatif tidak terjangkau (Brown, 1992b). Penelitian mengenai komunitas di sekitar lokasi pencemaran kronis di Asia menunjukkan bahwa semakin lama komunitas terpapar degradasi lingkungan tanpa respons kebijakan memadai, semakin dalam proses normalisasi berlangsung, dan semakin sulit memulihkan kepekaan komunal terhadap risiko (Norsa'adah et al., 2020b). Di Niyama, lebih dari satu dekade kondisi sampah yang tidak tertangani secara sistematis telah menciptakan kondisi di mana darurat sampah telah berhenti menjadi darurat dalam persepsi komunitas dan berubah menjadi kondisi kronis yang dinormalisasi.

### **Implikasi Normalisasi Ekologis bagi Transformasi Tata Kelola**

Beck, (2009) berpendapat bahwa masyarakat risiko mengandung potensi emansipatoris risiko modern yang bersifat lintas batas dapat menjadi basis kesadaran kolektif baru yang melampaui batas-batas kelas tradisional. Namun, potensi ini hanya terealisasi jika risiko dikenali sebagai risiko jika masyarakat memiliki pengetahuan, kerangka interpretasi, dan ruang deliberatif untuk mendefinisikan kondisi mereka sebagai tidak dapat diterima. Di Niyama, normalisasi ekologis secara sistematis melemahkan kondisi-kondisi tersebut: ketika sampah dipersepsikan sebagai kondisi normal, tidak ada tekanan dari bawah yang mendorong reformasi tata kelola yang lebih mendasar.

Kepala Desa Besuki mengusulkan mesin daur ulang berbasis komunitas yang mengolah sampah organik menjadi pupuk sekaligus menyerap tenaga kerja lokal sebagai

solusi jangka menengah sebuah pendekatan bottom-up yang menurut Lubis & Hamidipradja, (2025) lebih efektif menyentuh kesadaran warga dibandingkan sosialisasi formal dari atas. Bapak Subroto juga menekankan peran mahasiswa dan program KKN sebagai agen rekonstruksi persepsi risiko (Wawancara Bapak Subroto, 9 Mei 2026). Studi tentang komunitas bantaran sungai di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi sosial yang bermakna hanya dapat dicapai melalui intervensi yang secara bersamaan menasar ketiga lapisan dialektis: membongkar rutinitas eksternalisasi melalui edukasi partisipatif, meredefinisi tanggung jawab kolektif untuk menggeser objektivasi yang melemahkan agensi, serta membangun pengalaman keberhasilan konkret untuk menggantikan normalisasi risiko dengan kesadaran ekologis aktif (Zunariyah et al., 2025b).

Meminjam bahasa Beck, (2006), yang terjadi di Niyama adalah kegagalan ganda: kegagalan institusi mencegah produksi risiko ekologis, dan kegagalan mendistribusikan risiko yang terlanjur ada secara adil dan transparan. Tanpa pergeseran paradigmatik dari pendekatan reaktif berbasis yurisdiksi menuju pendekatan proaktif berbasis ekosistem yang mengakui hak komunitas terdampak atas informasi risiko, partisipasi bermakna, dan kompensasi yang adil krisis sampah di Niyama dan kawasan penyangga serupa di Indonesia akan terus berlangsung sebagai kedaruratan yang dinormalisasi bukan pengecualian yang menunggu untuk diselesaikan, melainkan kondisi struktural yang direproduksi setiap hari (Joss et al., 2019).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis sampah di Sungai Niyama bukan sekadar kegagalan teknis pengelolaan limbah, melainkan produk dari proses sosial yang lebih dalam: distribusi risiko yang tidak adil, governance gap antarlembaga, dan organized irresponsibility lintas yurisdiksi yang secara bersama-sama menghasilkan normalisasi ekologis. Melalui dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, praktik pembuangan sampah telah bertransformasi dari kebiasaan individual menjadi fakta sosial yang diterima sebagai kewajiban lingkungan. Kondisi *falling back to sleep* yang teridentifikasi di komunitas bantaran Niyama memperlihatkan bahwa darurat sampah telah berhenti menjadi darurat dalam persepsi kolektif sebuah proses yang secara aktif melemahkan kapasitas komunitas untuk menuntut perubahan.

Temuan ini menegaskan urgensi pergeseran paradigma tata kelola dari pendekatan reaktif berbasis yurisdiksi menuju kerangka berbasis ekosistem yang menempatkan keadilan distribusi risiko sebagai prinsip utama. Penguatan kesadaran risiko melalui edukasi lingkungan partisipatif, pembangunan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang mengikat, serta pemberian ruang bermakna bagi komunitas terdampak dalam pengambilan keputusan merupakan prasyarat bagi transformasi yang berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan informan yang terbatas pada dua aktor lokal; penelitian lanjutan perlu melibatkan perspektif institusional dari PJT, pemerintah kabupaten, dan komunitas hulu untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang arsitektur tata kelola risiko di kawasan ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Auyero, J., & Swistun, D. A. (2009). *Flammable: Environmental Suffering in an Argentine Shantytown* (p. 208). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195372946.001.0001>
- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. Translated by Mark Ritter. (1st edn). Sage Publications. [https://books.google.co.id/books?id=W2sDTHaSiiYC&pg=PP5&hl=id&source=gs\\_selected\\_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=W2sDTHaSiiYC&pg=PP5&hl=id&source=gs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false)
- Beck, U. (2006). Risk Society Revisited: Theory, Politics and Research Programmes. In *The sociology of risk and gambling reader* (pp. 68–90). Routledge.
- Beck, U. (2009). *World at Risk* (English ed., p. 269). Polity Press. <https://books.google.com/books?id=ZDj6qFUQgDEC>
- Bengtsson, M., Janya Sang-Arun, & Menikpura, N. (2012). *Sustainable Management of Organic Waste: The need for coordinated action at national and local levels* (No. 21). Institute for Global Environmental Strategies. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/resrep00742>
- Berger, P., & Luckmann, T. (2016). The social construction of reality. In *Social theory re-wired* (pp. 110–122). Routledge.
- Brown, P. (1992b). Popular Epidemiology and Toxic Waste Contamination: Lay and Professional Ways of Knowing. *Journal of Health and Social Behavior*, 33(3), 267–281. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/2137356>
- Bulkeley, H., & Betsill, M. (2005). Rethinking sustainable cities: Multilevel governance and the 'urban' politics of climate change. *Environmental Politics*, 14(1), 42–63. <https://doi.org/10.1080/0964401042000310178>
- Chiquitita. (2025, April 24). Daftar Sungai di Indonesia dengan Aliran Tertinggi: Progo—Kapuas. *CNBC Indonesia*.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20250424142128-128-628446/daftar-sungai-di-indonesia-dengan-aliran-tertinggi-progo--kapuas>

- Cornea, N., Véron, R., & Zimmer, A. (2017). Clean city politics: An urban political ecology of solid waste in West Bengal, India. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 49(4), 728–744. <https://doi.org/10.1177/0308518X16682028>
- Dwiky, A., Imron, A., Prasetyo, K., & Larasati, D. A. (2026). Determinants Influencing Household Waste Disposal Behavior in River Stream Areas. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 14(2), 1047–1064.
- Gopakumar, G. (2011). *Transforming urban water supplies in India: The role of reform and partnerships in globalization* (Edisi pertama) [Buku]. Routledge.
- Hird, M. J., Loughheed, S., Rowe, R. K., & Kuyvenhoven, C. (2014b). Making waste management public (or falling back to sleep). *Social Studies of Science*, 44(3), 441–465. JSTOR.
- Indrawati, D. (2011). Upaya pengendalian pencemaran sungai yang diakibatkan oleh sampah. *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, 5(6), 185–192.
- Ipsen, A., & McMillan Lequieu, A. (2025). From rationalized exploitation to supra sacrifice zones: Tracing sacrifice zones as a keyword of environmental sociology. *Environmental Sociology*, 11(3), 351–362. <https://doi.org/10.1080/23251042.2024.2430390>
- Joss, S., Sengers, F., Schraven, D., Caprotti, F., & Dayot, Y. (2019). The Smart City as Global Discourse: Storylines and Critical Junctures across 27 Cities. *Journal of Urban Technology*, 26(1), 3–34. <https://doi.org/10.1080/10630732.2018.1558387>
- Kline, T. C. (2001). Sheltering under the Sacred Canopy: Peter Berger and Xunzi. *The Journal of Religious Ethics*, 29(2), 261–282. JSTOR.
- Krahmann, E. (2011). Beck and beyond: Selling security in the world risk society. *Review of International Studies*, 37(1), 349–372. <https://doi.org/10.1017/S0260210510000264>
- Kumar, R., Das, M. M., Das, S., Verma, A., Valsan, G., Tamrakar, A., Warriar, A. K., Lamba, J., & Sharma, P. (2026). Microplastic Pollution in a Tropical River–Mangrove System of the Brahmani River in Bhitarkanika Wildlife Sanctuary, Odisha (India). *Water, Air, & Soil Pollution*, 237(13), 764. <https://doi.org/10.1007/s11270-026-09428-x>
- Lubis, R. L., & Hamidipradja, K. (2025). Harnessing Community Engagement to Reduce River Pollution: A Case Study of Collaborative Initiatives Along the Cikapundung River in Bandung City, Indonesia. *Journal of City Climate Policy and Economy*, 3(1), 135–167.
- Meadowcroft, J. (2007). Who is in Charge here? Governance for Sustainable Development in a Complex World. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 9(3–4), 299–314. <https://doi.org/10.1080/15239080701631544>
- Meidiana, C., & Gamse, T. (2010). Development of waste management practices in Indonesia. *European Journal of Scientific Research*, 40(2), 199–210.

- Mori, Y., Nakamata, T., Kuwayama, R., Yuki, S., & Ohnuma, S. (2024). Developing the littering behavior model focusing on implementation intention: A challenge to anti-environmental behavior. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 26(2), 776–791. <https://doi.org/10.1007/s10163-024-01909-7>
- Munawar, E., Yunardi, Y., Lederer, J., & Fellner, J. (2018). The development of landfill operation and management in Indonesia. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 20(2), 1128–1142.
- Nefilinda, S., Irwan, S., Rozana Eka Putri, I. S. H., Jamilah, T. F., & Judas Imo, C. A. J. (2025). *Lingkungan Yang Terancam* (1st edn). AKIOPEDIA PRESS.
- Nejadsadeghi, E., Yousefi, M., Ansarizadeh, M., & Ghasemi, A. (2025). Study of the impact of citizens' perceived behavioral control on waste littering behavior and the resulting environmental status. *Scientific Reports*, 15(1), 32062. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-17710-x>
- Njoku, P. O., Edokpayi, J. N., & Odiyo, J. O. (2019b). Health and Environmental Risks of Residents Living Close to a Landfill: A Case Study of Thohoyandou Landfill, Limpopo Province, South Africa. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(12), 2125. <https://doi.org/10.3390/ijerph16122125>
- Norsa'adah, B., Salinah, O., Naing, N. N., & Sarimah, A. (2020b). Community Health Survey of Residents Living Near a Solid Waste Open Dumpsite in Sabak, Kelantan, Malaysia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1), 311. <https://doi.org/10.3390/ijerph17010311>
- Ostrom, E. (2010). Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change. *20th Anniversary Special Issue*, 20(4), 550–557. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004>
- Post, J., & Baud, I. (2003). Between markets and partnerships: Urban solid waste management and contributions to sustainable development. *Global Built Environment Review*, 3(1), 46–65.
- Roeser, S. (2012). Risk communication, public engagement, and climate change: A role for emotions. *Risk Analysis: An International Journal*, 32(6), 1033–1040.
- Sakti, A. D., Sembiring, E., Rohayani, P., Fauzan, K. N., Anggraini, T. S., Santoso, C., Patricia, V. A., Ihsan, K. T. N., Ramadan, A. H., Arjasakusuma, S., & Candra, D. S. (2023). Identification of illegally dumped plastic waste in a highly polluted river in Indonesia using Sentinel-2 satellite imagery. *Scientific Reports*, 13(1), 5039. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-32087-5>
- Subroto, Ketua RT 9, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Tulungagung. Wawancara, 9 Mei dan 18 Mei 2026.
- Suharto, Kepala Desa, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Tulungagung. Wawancara, 22 Mei 2026.
- Wynne, B. (1996). May the sheep safely graze? A reflexive view of the expert-lay knowledge divide. *Risk, Environment and Modernity: Towards a New Ecology*, 40, 44.

- Zhang, A., Pang, B., Kim, J., Nguyen, T.-M., & Nham, P. T. (2022). An explorative study of psychological and social factors impacting littering behavior in Vietnam. *Frontiers in Psychology, 13*, 1025062. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1025062>
- Zunariyah, S., Sunesti, Y., & Demartoto, A. (2025a). Social transformation of winongo river bank people in managing domestic waste (Pt 03034). *E3S Web of Conferences, 605*, 1–8. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560503034>